



Dilema Keamanan Manusia dalam Implementasi Migrasi Iklim Terencana pada Perjanjian *Falepili Union* Australia-Tuvalu

Zulaikha Dzatil Izzah Rasidin^{1*}

¹Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Email Korespondensi: aaleekaaizzah@gmail.com

ABSTRAK

Tuvalu tengah menghadapi situasi genting imbas semakin abnormalnya laju perubahan iklim yang berpotensi menenggelamkan wilayah negara kepulauan dataran rendah di Pasifik ini. Tak hanya ancaman fisik, ketidakamanan tersebut turut mengancam kelangsungan hidup hingga identitas sosiokultural masyarakat Tuvalu. Inisiasi skema mobilitas iklim terencana di bawah kerangka Perjanjian Falepili Union antara Pemerintah Australia dan Tuvalu membawa solusi revolusioner dengan menawarkan akses kuota visa residensi bagi masyarakat Tuvalu untuk bermukim di Australia. Meski kesempatan ini menawarkan sejumlah nilai imbal balik bagi resiliensi Tuvalu, implementasi ini berpotensi erosif terhadap dimensi keamanan manusia masyarakat Tuvalu sebagai kelompok masyarakat adat rentan yang menjunjung keterikatan spiritual dengan tanah leluhurnya dan nilai kolektivisme. Dengan mengaplikasikan metode pendekatan kualitatif dalam spektrum epistemologi interpretivisme, artikel ini ditujukan untuk menganalisis dan mengelaborasi kondisi dilematis yang dihadapi masyarakat Tuvalu melalui konsep kerentanan bersama (mutual vulnerability) yang mencakup ketidakamanan (insecurity) pada dimensi lingkungan, ekonomi, dan sosiokultural. Hasil penelitian merefleksikan signifikansi pendekatan multidimensi keamanan manusia dalam implementasi solusi adaptasi iklim yang mampu memahami konteks kehidupan dan narasi masyarakat Tuvalu untuk melindungi martabat dan resiliensi komunitasnya.

Kata Kunci: Migrasi Iklim; Falepili Union; Keamanan Manusia; Kerentanan Bersama; Resiliensi Komunitas.

PENDAHULUAN

Negara-negara atol di Kawasan Pasifik tengah menghadapi ancaman eksistensial kritis imbas perubahan iklim yang kian memburuk. Laju pemanasan global yang abnormal akibat aktivitas antropogenik serta kerentanan kondisi geografis alamiah mengakselerasi

kenaikan permukaan air laut dan intensitas gelombang pasang yang berpotensi menenggelamkan wilayah negara-negara kepulauan dataran rendah tersebut. Penelitian Sea Level Change Team NASA (2023) mencatat Tuvalu sebagai negara paling terancam dengan laju elevasi muka air laut 1.5 kali lebih cepat daripada rerata global, memproyeksikan 95% wilayah Tuvalu berpotensi tenggelam sebelum akhir abad ini. Hal tersebut menunjukkan perlunya aksi segera untuk menyelamatkan wilayah dan kelangsungan hidup masyarakat Tuvalu.

Menanggapi kegentingan tersebut, Pemerintah Australia dan Tuvalu menginisiasikan program migrasi iklim terencana yang menjadi substansi inti dari Perjanjian *Falepili Union* yang diadopsi pada 2023. Skema mobilitas ini memberikan akses visa residensi permanen bagi masyarakat Tuvalu untuk memperbaiki kualitas hidup dan mengembangkan keterampilan di Australia. Program migrasi ini menerapkan sistem *ballot* dengan jumlah alokasi kuota disesuaikan dengan kesepakatan antarkedua negara setiap tahunnya. Implementasi dari program migrasi iklim ini masih berjalan di tahun pertamanya dengan alokasi maksimal 280 kuota tiap tahunnya. Skema migrasi yang ditawarkan oleh perjanjian ini menggarisbawahi penghargaan terhadap nilai-nilai tradisional dan martabat masyarakat Tuvalu. Pemerintah Australia juga menjamin perlindungan terhadap kedaulatan kolektif dan keterhubungan komunitas diaspora Tuvalu di negaranya.

Konsep *Migration with Dignity* sebagai respons terhadap mitigasi darurat iklim di Kawasan Pasifik bukanlah terobosan baru, melainkan telah lebih dahulu diperkenalkan oleh Kiribati sejak 2012. Pemerintah Kiribati menyediakan pelatihan demi meningkatkan keterampilan dan kualifikasi vokasional warga negaranya agar mampu bekerja di luar negeri secara legal dan terhormat. Dengan begitu, nilai imbal balik khususnya penerimaan remitansi diharapkan dapat meningkat seiring bertumbuhnya komunitas diaspora di berbagai negara penerima. Berbeda dengan skema migrasi iklim pada Perjanjian *Falepili Union* yang terjalin secara strategis dan mengikat antara kemitraan Pemerintah Australia dan Tuvalu, strategi milik Kiribati berjalan unilateral sehingga tidak ada jaminan residensi permanen bagi para migran. Berdasarkan perbandingan tersebut, skema versi Australia-Tuvalu membawa optimisme yang lebih menjanjikan.

Kerangka migrasi yang mengintegrasikan aspek martabat (*dignity*) sesuai dengan kondisi masyarakat Tuvalu sebagai kelompok rentan yang lekat dengan keutuhan budayanya. Kerangka ini mengakui bahwa hak inheren setiap orang atas martabat melintasi batas-batas yurisdiksi, terlepas dari pembatasan yang didasarkan pada konsep kedaulatan baik negara pengirim maupun penerima migran. Skema yang terencana memberikan kejelasan pilihan bagi masyarakat Tuvalu mengenai apa, kapan, dan bagaimana mereka bermigrasi dalam upaya mencapai kehidupan yang bermartabat. Kejelasan tersebut juga memastikan mereka yang bermigrasi memiliki keterampilan yang diperlukan untuk beralih dan menyesuaikan diri ke kehidupan yang setara atau lebih baik daripada yang mereka tinggalkan (McClain & Bruch, 2021).

Terlepas dari optimisme tersebut, terdapat sejumlah kekhawatiran dan skeptisisme yang mengitari skema migrasi ini. Farbotko *et al.* (2022) dalam penelitiannya mengungkapkan berbagai kendala dan tekanan sosial yang dihadapi oleh pekerja asal Tuvalu di Australia dalam beradaptasi dengan perubahan iklim. Meskipun para pekerja memperoleh manfaat ekonomi dan pekerjaan lebih stabil di perantauannya, banyak dari mereka melaporkan kesehatan mental buruk dan keretakan keluarga. Kekhawatiran mereka terkait dampak jangka panjang perubahan iklim terhadap masa depan pekerjaan dan kelangsungan hidup kerabat mereka di Tuvalu tidak pernah betul-betul menghilang.

Sejauh ini, penelitian-penelitian terdahulu mengenai Perjanjian *Falepili Union* masih berorientasi pada level analisis negara dan persoalan normatif. Analisis masih terfokus pada aspek geopolitik strategis Australia terhadap penguatan pengaruh Tiongkok di Kawasan Pasifik (Amelia, 2025; Luahambowo *et al.*, 2025), status kenegaraan (*statehood*) Tuvalu di bawah hukum internasional (Green & Guilfoyle, 2024; Bazela & Robinson, 2025; Jiang *et al.*, 2025), perdebatan terkait kekosongan hukum dan pengakuan internasional atas status pengungsi iklim (*climate refugee*), serta perspektif keadilan iklim (*climate justice*) yang menghubungkannya dengan kesenjangan tanggung jawab moral negara-negara industri maju besar terhadap negara-negara kecil dan berkembang (Kitara & Farbotko, 2023).

Penelitian Elina (2025) menemukan minimnya elaborasi mengenai isu-isu kontekstual komunitas dan kebudayaan Tuvalu dalam Perjanjian *Falepili Union*. Sesuai dengan esensi perjanjian, proteksi atas martabat masyarakat Tuvalu merupakan acuan terpenting dalam program migrasi ini. Tanpa menempatkan manusia sebagai objek rujukan (*referent object*) atau entitas utama yang harus dilindungi, proteksi atas martabat tersebut tidak mungkin terwujud. Untuk itu, penelitian ini mencoba untuk memberikan kontribusi analisis yang lebih komprehensif dengan mengaplikasikan konsep keamanan manusia (*human security*). Pendekatan keamanan manusia menggeser orientasi studi keamanan dari sekedar keamanan dalam makna tradisional yang berorientasi pada negara menjadi “human and people-centered” seiring diversifikasi isu-isu keamanan (Sedra, 2022). Meskipun memang pada realitanya, tanggung jawab atas usaha penjaminan keamanan manusia tetap berakar pada pemerintah negara sehingga identifikasinya juga bergantung pada gagasan dan kontekstualitas negara bersangkutan (Šehović, 2018).

Tak terbatas pada unsur fisik, keamanan manusia menegaskan bahwa unsur non-fisik dan ideasional termasuk rasa takut turut menjadi determinan subjektif yang mendasari persepsi mengenai perasaan aman maupun tidak aman manusia (Buzan, 1983). United Nations Development Programme (UNDP) dalam Human Development Report-nya pada 1994 kemudian merevolusikan konsep keamanan manusia sebagai bagian dari norma internasional. Di dalam standar tersebut, manusia sejatinya dianugerahkan dua (2) kebebasan asasi yang saling terhubung meliputi kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*) dan kebebasan dari kemiskinan (*freedom from want*). Pada intinya, pendekatan keamanan manusia yang sejati tidak sebatas tentang bertahan hidup, namun juga kesejahteraan dan kemerdekaan dalam kehidupan tersebut.

Sebagai pokok fundamental dari keamanan manusia, martabat menyentuh setiap aspek penting dalam kehidupan serta mencerminkan pengalaman sebagaimana dirasakan oleh manusia itu sendiri. Oleh karena itu, dilema implementasi akan diuraikan berdasarkan kerangka konseptual kerentanan bersama (*mutual vulnerability*) Nef (1995) yang meliputi dimensi ketidakamanan lingkungan (*environmental insecurity*), ketidakamanan ekonomi (*economic insecurity*), dan ketidakamanan sosiokultural (*sociocultural insecurity*). Seluruh unsur tersebut menciptakan dinamika *push-and-pull* yang memengaruhi motivasi serta kemandirian menentukan nasib sendiri atau *self-determination* masyarakat Tuvalu untuk memilih berpindah atau tetap tinggal di tanah air mereka. Kompleksnya cakupan keamanan manusia yang multidimensional tersebut selanjutnya menimbulkan siklus efek kausalitas dan domino yang berantai antar area.

Pendekatan keamanan manusia memberi nilai terhadap perlindungan atas identitas, nilai luhur, dan martabat individu juga kelompok masyarakat secara kolektif (Buzan, 1991; Hampson, 2008). Meski ditujukan untuk memberi nilai imbal balik bagi Tuvalu untuk meningkatkan resiliensi dan kapasitasnya sebagai komunitas sekaligus negara, terdapat

sejumlah celah dan poin kontradiktif yang dikhawatirkan justru menimbulkan implikasi serius terhadap kelangsungan hidup dan identitas komunal masyarakat Tuvalu. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap aspek keamanan manusia demi implementasi yang lebih optimal, berkualitas, dan dapat mengakomodasi narasi masyarakat Tuvalu. Hasil evaluatif dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan preseden yang dapat menengahi situasi dilematis dalam tata kelola migrasi iklim, serta mengukur proporsi antara urgensi proteksi fisik dari ancaman perubahan iklim dan risiko erosi keamanan manusia akibat migrasi yang dijalankan sebagai respons adaptif terhadapnya.

METODE

Metode pendekatan kualitatif diaplikasikan dengan tujuan memperoleh pemahaman komprehensif serta menyajikan jawaban bersifat interpretatif mengenai dimensi keamanan manusia dalam implementasi inisiatif migrasi iklim terencana ini. Pola penalaran dan analisis data dilakukan secara induktif, di mana penarikan kesimpulan bertolak pada pernyataan dari berbagai data deskriptif relevan. Data diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan dengan kredibilitas, meliputi publikasi resmi pemerintah maupun organisasi internasional, publikasi akademik mencakup buku dan artikel jurnal akademik, hingga portal berita daring. Data-data tersebut lalu diseleksi berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian dan kemudian dianalisis untuk mendukung argumentasi berbasis faktual penulis serta memperkuat kualitas keilmiah penelitian.

Dalam konteks metodologi ilmu hubungan internasional, penelitian ini berorientasi pada spektrum epistemologi interpretivisme. Spektrum ini bersifat reflektif dan konstruktif sebagai upaya untuk memahami makna sosial yang melekat pada fenomena dalam hubungan internasional, bukan sekedar menyajikan penjelasan hasil observasi (Lamont, 2015). Jenis penelitian ini mengiluminasi hakikat dari ide, narasi, identitas, norma, dan budaya yang melatarbelakangi fenomena dalam politik internasional. Hal ini sesuai dengan fenomena migrasi sebagai fenomena sosial serta karakteristik dari konsep keamanan manusia yang memusatkan perhatiannya pada nilai-nilai dasar kehidupan manusia (Hampson, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Environmental Insecurity (Ketidakamanan Lingkungan)

Deteriorasi lingkungan dan ekologi merupakan problematika global mengingat dampaknya yang tidak mengenal batas. Ketidakamanan lingkungan bersifat sistemik yang membawa disfungsi resiprokal atas satu sama lain sehingga meningkatkan rantai kerentanan (Nef, 1995). Katastrofe akibat perubahan iklim tersebut mendorong manusia untuk mengambil tindakan preemtif demi keselamatan nyawa dan penghidupannya, utamanya melalui mobilisasi ke wilayah yang relatif lebih aman. Hal tersebut mensugestikan bahwa migrasi iklim telah memasuki domain keamanan dan menjadi bagian dari proses sekuritisasi ancaman keamanan non-tradisional (Boas, 2015). Sejumlah perihal krusial dalam keamanan lingkungan dalam konsep keamanan manusia mencakup perlindungan dari degradasi lingkungan hidup, deplesi sumber daya alam, hingga visi pembangunan berkelanjutan.

Pada dasarnya, area ketidakamanan lingkungan mencakup implikasi dari ancaman-ancaman fisik alamiah serta aktivitas antropogenik yang meningkatkan kerentanan tersebut. Keunikan topografi Tuvalu sebagai negara yang terkumpul atas pulau-pulau

karang dataran rendah dengan titik tertinggi kurang dari lima (5) meter di atas permukaan laut menyebabkan struktur geografis Tuvalu sangat rapuh. Tuvalu juga mengalami dampak akumulasi berlapis akibat faktor alamiah arus laut dan angin di Kawasan Pasifik. Dengan kombinasi tren perubahan iklim yang semakin memburuk, wilayah Tuvalu berada di ambang bahaya akan banjir episodik luar biasa jika proteksi yang tepat tidak terwujud hingga 2050 (NASA Sea Level Change Team, 2024). Tanpa aksi yang optimal, 95% daratan Tuvalu diproyeksikan tenggelam pada awal abad selanjutnya. Merespons kedaruratan tersebut, Tuvalu menuntut kenaikan permukaan laut untuk diagendakan terpisah dari sekedar bagian pembahasan dalam agenda perubahan iklim (Needham, 2024).

Degradasi pada ruang hidup fisik merupakan ancaman eksistensial langsung dalam dimensi ini. Ketidakamanan lingkungan menjadi akar dari interkoneksi kerentanan manusia pada dimensi lainnya bagi Tuvalu. Tumpukan kebencanaan akibat krisis iklim pada areal litosfer, hidrosfer, dan atmosfer berinteraksi terhadap biodiversitas dalam biosfer hingga akhirnya berdampak pada aktivitas antroposfer. Kondisi tersebut meliputi krisis sanitasi, irigasi, produktivitas pangan, hingga akhirnya dapat menciptakan gangguan pada sistem sosial, ekonomi, dan politik manusia yang memperoleh kebermanfaatan atasnya. Erosi dan intrusi air laut tak hanya menenggelamkan pemukiman, tetapi juga merusak lapisan air di bawah tanah. Salinasi tinggi menyebabkan sumber air untuk kebutuhan domestik menjadi tidak layak minum dan tidak mampu difungsikan untuk kegiatan agrikultur.

Mengingat Tuvalu bergantung pada pertanian subsisten dan terbatasnya opsi bahan pangan substitusi, kerentanan masyarakat akan kelaparan, malnutrisi, dan gangguan kesehatan lainnya meningkat. Hal tersebut mencerminkan keterhubungan antara keamanan pangan (*food security*) dan keamanan kesehatan (*health security*) sebagai bagian dari dimensi keamanan manusia. Kawasan Pasifik diidentifikasi sebagai titik panas kritis bukti dampak perubahan iklim pada gelombang panas laut (Frölicher, 2018). Hal tersebut membawa konsekuensi serius bagi ekosistem maritim dan mereka yang menggantungkan hidup terhadapnya, baik untuk keperluan konsumsi maupun keperluan ekonomi. Ilustrasi keterkaitan dalam kerentanan multisektoral tersebut bermakna bahwa tanah Tuvalu telah kehilangan kapasitasnya untuk menampung kebutuhan populasinya seiring penyusutan tanah yang terus terjadi akibat perubahan iklim.

Wilayah tanah air Tuvalu berada di ambang kehancuran habitat. Implementasi migrasi iklim terencana merupakan respon untuk meminimalisasi kekacauan akibat kedaruratan mendadak yang sewaktu-waktu dapat menimpa wilayah Tuvalu, mengingat kerentanan tinggi wilayah ini terhadap bencana alam. Pendekatan ini menerapkan konsep *hazard paradigm* yang semata-mata melihat bencana sebagai akibat dari bahaya alam yang secara inheren bersifat nondiskriminatif sehingga fokusnya hanya terbatas pada bagaimana manusia menanggapi cepat dan mengurangi risiko dari ancaman tersebut (Akel, 2024). Dengan begitu, konteks sosial cenderung tidak diperhitungkan karena tekanan waktu dan keselamatan hidup manusia dianggap sebagai taruhan utama dalam merespons bencana.

Meski jelas telah memprioritaskan keamanan fisik manusianya, relokasi terencana ini berpotensi mengabaikan kehancuran ruang hidup di tanah air asli. Memindahkan manusia jelas tidak memberi kontribusi terhadap resiliensi dan perbaikan kualitas kelayakhunian wilayah Tuvalu di tengah liarnya perubahan iklim. Relokasi sejatinya tidak menyentuh akar masalah dari masalah iklim global, yakni ekstremnya peningkatan

konsentrasi gas rumah kaca akibat masifnya industrialisasi oleh negara-negara industri besar. Ketidaksetaraan tanggung jawab atas pembagian risiko iklim tersebut juga menjadi contoh ketidakadilan iklim global yang terjadi saat ini, di mana negara-negara rentan seperti Tuvalu yang justru harus menanggung penderitaan terbesar. Berdasarkan data Global Carbon Budget (2025), porsi emisi gas rumah kaca Tuvalu secara kumulatif bahkan kurang dari 0.01% tetapi penderitaan masyarakat akibat dampaknya justru semakin meningkat. Dengan logika tersebut, relokasi sepatutnya tidak menjadi opsi utama dalam menanggulangi urgensi ketidakamanan lingkungan ini.

Di satu sisi, bermigrasi dapat diinterpretasikan sebagai pengakuan kekalahan terhadap alam. Dalam momentum yang sama dengan peresmian Perjanjian *Falepili Union*, Pacific Islands Forum (PIF) melalui Pacific Regional Framework on Climate Change (2023) mempertegas asumsi tersebut. Pasal 23 dari kerangka kerja ini menekankan bahwa relokasi terencana seharusnya hanya dijadikan sebagai *last resort* oleh negara-negara Pasifik. Merelokasikan masyarakat ke tempat yang lebih aman secara terencana cukup diakui sebagai langkah antisipatif untuk mencegah perpindahan paksa (*forced displacement*) maupun pemulihan pasca bencana, apabila wilayah asal mereka benar-benar tidak lagi memungkinkan untuk dihuni. Meski demikian, kerangka kerja ini tetap mengakui rasa tidak aman yang akhirnya menyulut keinginan masyarakat Pasifik untuk bermigrasi seiring semakin intensnya ancaman iklim terhadap kehidupan mereka.

Dari sisi normatif, Perjanjian *Falepili Union* memuat dua (2) arah solusi. Pada Pasal 2 ayat (1a), perjanjian ini menegaskan pengakuan terhadap keinginan rakyat Tuvalu untuk terus tinggal di wilayah mereka sebagai wujud keterkaitan leluhur yang mendalam. Sejalan dengan itu, Australia berkomitmen memberikan bantuan kepada Tuvalu dalam menanggapi “major natural disaster” sebagaimana tertera pada Pasal 4 mengenai “Cooperation for security and stability”. Melalui konferensi pers, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese juga menegaskan komitmen Australia untuk bekerja sama dalam menghadapi ancaman eksistensial akibat perubahan iklim melalui pengembangan teknologi adaptasi iklim bagi Tuvalu. Proyek infrastruktur iklim utama Tuvalu, Tuvalu Coastal Adaptation Project yang ditopang secara finansial oleh Pemerintah Australia semakin diperderas alur pendanaannya. Namun pada Pasal 3 mengenai “Human mobility with dignity”, Australia juga mendorong solusi migrasi iklim terencana bagi rakyat Tuvalu untuk berpindah ke Australia. Hal tersebut menunjukkan perlunya kecermatan Australia dan Tuvalu dalam membagi porsi respons terhadap kedua arah solusi sesuai tingkat urgensitasnya agar tidak menelantarkan kerapuhan fisik tanah Tuvalu.

Masyarakat Tuvalu terjebak dalam dilema kemanusiaan antara urgensi merespon ancaman gradual dari perubahan iklim dan kekhawatiran akan keselamatan nyawa apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam mendadak yang tak terhindarkan. Temuan bahwa kenaikan permukaan laut diprediksi tetap sulit untuk diperlambat dalam waktu dekat meskipun emisi gas rumah kaca global telah mencapai level stabil turut memperumit perhitungan dalam dilema ini (Zheng *et al.*, 2026). Di satu sisi, migrasi yang ditawarkan Perjanjian *Falepili Union* menyediakan jaminan preemtif terhadap keselamatan nyawa dan jiwa para migran. Namun di sisi lain, inisiatif ini membawa dilema tentang tanggung jawab pemulihan ekosistem yang ditinggalkan. Langkah tersebut dapat menyebabkan pengabaian ekologis serta mendistraksi keperluan akan pembangunan infrastruktur adaptasi iklim yang berkelanjutan di ruang hidup asli. Akibatnya, tanggungan beban dan rasa tidak aman yang harus dipikul oleh mereka yang tertinggal di tanah asli justru kian berat.

Economical Insecurity (Ketidakamanan Ekonomi)

Keamanan ekonomi merujuk pada terjaminnya ketersediaan sumber pendapatan primer (*key income*) dan sumber daya pendukung lainnya yang memungkinkan individu untuk memenuhi kebutuhan hidup dasarnya secara berkecukupan dan berkelanjutan. Kondisi tersebut ditandai oleh ketersediaan mata pencaharian yang produktif (United Nations Development Programme, 1994). Dalam bahasa keamanan manusia, keamanan ekonomi melampaui persoalan nilai uang, melainkan *freedom from want*. Keamanan ekonomi membahas segala kondisi dan aktivitas dalam demografi ekonomi suatu populasi, meliputi kemampuan struktur ekonomi tersebut dalam mendukung pemenuhan hak atas standar hidup dasar (Nef, 1995).

Standar hidup dasar yang dimaksud ialah akses memadai terhadap makanan, air, perumahan, layanan kesehatan, layanan sosial, dan jaminan keamanan ekonomi apabila terjadi pengangguran, pemutusan hubungan kerja, dan kondisi keterbatasan mata pencaharian lainnya di luar kendali individu. Hal itu sejalan dengan perhitungan Multidimensional Poverty Index (MPI) global yang juga memperhitungkan tiga (3) dimensi pokok dalam melihat fenomena kemiskinan, yakni dimensi kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup. Lebih lanjut, indikator ketidakamanan ekonomi yang diuraikan oleh Nef (1995) mencakup stagflasi, pengangguran, keadaan berutang (*indebtedness*), berkurangnya peluang pekerjaan, kemiskinan berkepanjangan, krisis pertumbuhan pendapatan pribadi, hingga menurunnya kualitas *human capital* dan tenaga kerja produktif.

Implementasi migrasi iklim terencana yang ditawarkan oleh skema mobilitas manusia dalam Perjanjian *Falepili Union* bersifat siklis. Pengaturan mobilitas menjadi pilihan adaptasi andalan bagi komunitas rentan yang tengah menghadapi tantangan sosioekonomi kompleks akibat masalah-masalah perubahan iklim. Adanya pengaturan mobilitas memungkinkan proses transisi dan penyesuaian masyarakat untuk berlangsung secara bertahap (Internasional Organization for Migration, 2014). Namun, tidak terdapatnya jumlah kuota tetap dan kejelasan jadwal keberangkatan untuk gelombang selanjutnya menimbulkan ketidakpastian terhadap masa depan implementasinya. Kondisi tersebut berujung pada ketidakamanan ekonomi yang terdistribusikan kepada kedua belah pihak, baik bagi masyarakat yang menetap maupun telah bermigrasi ke Australia.

Tantangan keamanan ekonomi utama dari implementasi migrasi iklim terencana ini ialah risiko semakin parahnya fenomena *brain drain*. Fenomena ini terjadi ketika kelompok tenaga kerja terdidik dan terampil yang umumnya angkatan kerja berusia produktif meninggalkan negara asalnya. Eksodus *human capital* berkualitas secara berangsur-angsur dapat menciptakan stagnasi bahkan kelumpuhan struktural pada roda sektor ekonomi domestik (World Bank Group, 2021). Meski di satu sisi hasrat bermigrasi demi peluang ekonomi yang lebih baik dapat dipahami, kekosongan tenaga kerja terampil yang semakin sulit untuk diisi oleh tenaga kerja yang tersisa dapat merapuhkan tatanan sosial dan ekonomi komunitas masyarakat Tuvalu serta menghambat pembangunan.

Skema migrasi khususnya untuk kelompok pekerja sebenarnya bukanlah hal baru bagi Tuvalu. Sejak awal 2000-an, Tuvalu telah menjalin kerja sama dan mengirimkan tenaga kerjanya ke luar negeri melalui berbagai skema migrasi sementara seperti Pacific Access Category (PAC) dengan Selandia Baru serta Seasonal Worker Program (SWP) dengan Australia. Meski kuota migrasi dalam skema-skema tersebut relatif rendah, data World Bank (2021) menunjukkan bahwa Tuvalu telah mengalami penurunan populasi kelompok usia kerja yang cukup drastis akibatnya. Pengalaman tersebut perlu menjadi

perhatian. Pemerintah Australia menegaskan bahwa jumlah kuota tahunan yang tidak akan melebihi 280 orang tiap tahunnya justru ditujukan untuk mencegah fenomena *brain drain* (Office of the Prime Minister of Australia: The Hon Anthony Albanese MP, 2023). Namun apabila kuota tersebut tetap, seperempat dari penduduk mungkin telah berpindah ke Australia dalam kurun waktu satu dekade, meskipun sebagian mungkin akan kembali atau berbolak-balik antara kedua negara (McAdamm, 2025).

Terdapat pula perdebatan mengenai keadilan akses. Rekrutmen untuk calon migran iklim terencana Perjanjian *Falepili Union* menerapkan prinsip ekualitas. Kesempatan ini tersedia bagi seluruh warga negara Tuvalu, tak terbatas pada pekerja, dan tanpa kriteria batas usia maksimal. Anak-anak, penderita disabilitas dan berkebutuhan khusus, hingga lansia dapat mengajukan permohonan baik secara mandiri maupun untuk kategori tanggungan (*dependent*). Kesenjangan kesempatan antar gender yang terakar dalam sektor pendidikan tinggi dan ketenagakerjaan formal Tuvalu juga dapat ditekan. Keunggulan tersebut merupakan terobosan baru yang belum pernah diterapkan oleh skema migrasi terdahulu. Namun dari perspektif lain, keterbukaan tersebut justru dapat diartikan sebagai ketidakpastian yang akhirnya menciptakan rasa tidak aman baru bagi masyarakat. Selain itu secara rasional, kandidat dengan jenis profesi yang dibutuhkan oleh pasar kerja Australia tentu akan lebih dipertimbangkan di balik layar.

Kebijakan migrasi seringkali mengunggulkan kemanfaatan remitansi terhadap perekonomian negara asal. Tak dapat dipungkiri, migrasi telah menjadi komponen struktural penting dari perekonomian negara-negara di Pasifik. Remitansi dapat membantu masyarakat yang menetap di Tuvalu untuk mengurangi kerentanannya terhadap perubahan iklim, memperbaiki kualitas hidup, serta diinvestasikan untuk meningkatkan layanan pendidikan dan modal sosial untuk masa depan. Meski demikian dalam kasus Tuvalu, pemikiran tersebut bersifat paradoks dan berisiko menimbulkan konsekuensi maladaptasi dalam implementasi migrasi (Barnett *et al.*, 2025). Data terbaru World Bank menemukan rasio remitansi personal terhadap Gross Domestic Product (GDP) Tuvalu hanya berkisar 4.1% pada 2023. Angka ini tergolong sangat rendah dibandingkan negara-negara Pasifik lainnya yang rata-rata menerima kebermanfaatannya remitansi hingga melebihi 20% dari rasio GDP-nya.

Prospek pemanfaatan remitansi hanya mampu menyelesaikan masalah konsumsi jangka pendek dan tidak berkontribusi banyak bagi keberlanjutan ekonomi dan resiliensi iklim jangka panjang Tuvalu (Barnett *et al.*, 2024). Profil perekonomian Tuvalu berdiri di atas kondisi fragilitas struktural yang membuatnya amat rentan secara sistemik. Selain demografi yang cenderung subsisten dan pasif secara ekonomi, dependensi mutlak perekonomian Tuvalu terhadap bantuan asing turut menjadi perhatian. Berdasarkan data Lowy Institute (2023), Tuvalu menempati posisi pertama dunia sebagai *aid-reliant country* dengan rasio Official Development Finance (ODF) asing terhadap GDP terbesar di antara 125 negara berkembang lainnya. Jumlah bantuan pembangunan dalam bentuk *grant* (hibah) tersebut melampaui 146% dari output ekonomi nasional Tuvalu dengan Australia sebagai mitra penyumbang utama dengan porsi 26%.

Sejak 2014, target *policy goal* (tujuan kebijakan) Tuvalu dalam bermitra dengan negara asing didominasi oleh dua (2) tren yakni *climate-significant* dan *climate-principal* (Lowy Institute, 2023). Perubahan iklim tak terpungkiri telah menjadi agenda payung utama dalam setiap kerja sama, yang secara signifikan memperdalam relasi dependensi asimetris kompleks Tuvalu dengan Australia. Sejarah panjang hubungan Tuvalu dan Australia dalam menanggapi isu mendesak tekanan demografis dan ekonomi akibat

perubahan iklim akhirnya membawa kedua pihak pada opsi kebijakan yang transformatif di tengah situasi keputusan, yakni *climate visa*. Dengan begitu, Tuvalu telah secara sadar mengakui Australia sebagai *economic lifeline* dan bersedia memperdalam integrasi seluruh sektor kehidupannya di bawah pengawasan Australia.

Ketergantungan tersebut memicu pengabaian terhadap mata pencaharian tradisional, yakni kegiatan ekonomi subsisten. 42% pendapatan nasional Tuvalu disumbangkan oleh sektor perikanan dan lisensi penangkapan ikan (World Bank Group, 2021). Nilai ekonomi dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Tuvalu seluas 900.000 km² ikut terdampak perubahan iklim, menimbulkan ketidakamanan ekonomi skala makro mengenai keberlanjutan status batas-batas maritim hingga degradasi produktivitas hasil lautnya. Kerusakan lingkungan, berkurangnya tenaga kerja, dan tidak kuatnya dukungan terhadap masyarakat yang tersisa akan menghilangkan kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat yang memang terbatas sejak awal. Konsekuensinya, masyarakat akan semakin rentan dengan fluktuasi harga barang internasional khususnya situasi perekonomian Australia sebagai mitra impor utama yang berkontribusi atas 30% total pangsa impor tahunan. Meski demikian, ancaman keamanan ekonomi tersebut nampaknya belum timbul mengingat Consumer Price Index (CPI) Tuvalu belum menunjukkan kenaikan yang signifikan (Tuvalu Central Statistic Divisions, 2025).

Kebijakan migrasi secara tidak langsung dapat melanggengkan disparitas konsentrasi beban ekonomi antarwilayah dan kelompok. Hal tersebut menyebabkan kemiskinan justru terkonsentrasi di ibu kota Funafuti yang disebabkan oleh ketergantungan masyarakat pada *cash economy* pusat perkotaan. Meskipun angka pendapatan per kapita terlihat relatif normal, data Asian Development Bank (2026) menemukan bahwa National Poverty Line Tuvalu berada di angka 21.5%. Human Development Index (HDI) Tuvalu juga cukup memprihatinkan dengan peringkat 129 dari 193 negara pada 2023. Sejalan dengan prinsip analisis keamanan manusia yang bersifat lebih kualitatif, indikator kuantitatif tidak serta-merta menggambarkan rasa aman yang dirasakan oleh manusia sebagai objek rujukan di balik angka dan statistik tersebut.

Migrasi adalah pedang bermata dua bagi perekonomian suatu negara. Migrasi yang diharapkan dapat membantu warga negara untuk memperoleh peluang bekerja di luar negeri dan membawa remitansi dapat menjadi kontraproduktif apabila struktur ekonomi domestik justru dipinggirkan. Meski minat masyarakat Tuvalu untuk mengajukan permohonan visa iklim ini sangat tinggi, skeptisitas menyertai masyarakat Tuvalu mengenai prospek jangka panjang mobilitas serta nasib warga lansia di Tuvalu jika angkatan kerja berpindah duluan (McAdamm, 2025). Ketidakamanan juga dirasakan oleh mereka yang telah berhasil bermigrasi ke Australia. Perpindahan dari ekonomi yang sederhana menuju pasar kerja Australia yang lebih kapitalistik dan kompetitif dapat menimbulkan kegegaran biaya hidup serta kesulitan adaptasi dengan kultur kerja baru.

Meskipun hak kerja dan tunjangan keuangan dijamin oleh Pemerintah Australia, label “migran” menyebabkan mereka tetap berisiko untuk terjebak dalam hubungan kerja yang asimetris dan rentan akan eksploitasi kerja. Ancaman terhadap *freedom from fear* atau keamanan diri dari segala tindakan eksploitatif, kriminalitas, dan penelantaran juga dikategorikan sebagai dimensi *personal security* (United Nations Development Programme, 1994). Oleh karena itu, pengawasan dan dukungan yang berkelanjutan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk membantu proses integrasi mereka ke dalam tatanan sosial dan ekonomi Australia. Kemudian untuk menjamin keadilan mobilitas lintas batas, investasi berkelanjutan di sektor-sektor kunci pembangunan Tuvalu meliputi

perlindungan pesisir dan infrastruktur adaptasi iklim juga tidak boleh dikesampingkan (Gamboa & Goh, 2025).

Sociocultural Insecurity (Ketidakamanan Sosiokultural)

Matriks analisis Nef (1995) sejatinya memisahkan antara ketidakamanan dimensi sosial dan kultural. Ketidakamanan sosial (*social insecurity*) dikaitkan dengan konstruksi sistem sosiodemografi suatu populasi yang meliputi unsur identitas, ekspektasi sosial, praktik sosial, status dan peran dalam struktur sosial yang berproses melalui interaksi termasuk mobilisasi. Berbeda dengan ketidakamanan sosial yang menelaah keadilan, perdamaian, dan integritas antarmasyarakat, ketidakamanan kultural (*cultural insecurity*) membahas sistem pengetahuan dan keterampilan yang tercipta melalui proses pembelajaran atau internalisasi nilai-nilai dasar. Adapun variasi istilah lain dalam studi keamanan manusia bagi area substansial ini meliputi *societal security* (Buzan, 1983; Wæver *et al.*, 1993) dan *community security* (United Nations Development Programme, 1994).

Migrasi dapat menjadi sumber sekaligus gejala dari ketidakamanan sosiokultural. Migrasi yang berpola teratur, stabil, dan “dapat diserap” tidak akan menimbulkan masalah serius bagi wilayah asal maupun penerima migran (Nef, 1995). Namun seiring meningkatnya ketidakpastian khususnya kondisi ekonomi di negara penerima, sudut pandang etnosentris hingga xenofobia dalam melihat fenomena migrasi ikut meningkat. Gejala lainnya ialah kemunduran komunitas dan lenyapnya bentuk-bentuk otoritas tradisional. Terputusnya kontak langsung dengan akar identitas sosiokultural dan agen sosialisasi asli akibat integrasi menuju bentuk-bentuk asosiasi yang lebih besar dan diversifikasi menciptakan tendensi impersonalisasi dan anomi (Nef, 1995). Sebagai akibatnya, rasa keterikatan afektif dan kepemilikan sosial (*sense of belonging*) terhadap identitas asli tersebut akan memudar. Rangkaian proses tersebut menunjukkan korelasi erat antara dimensi sosial dan kultural dalam mengamati fenomena migrasi.

Kerja sama yang dijalin antara Australia dan Tuvalu melalui Perjanjian *Falepili Union Treaty* mengadopsi konsep *falepili*. Konsep *falepili* merupakan bagian dari identitas masyarakat Tuvalu yang mencerminkan nilai-nilai leluhur kerukunan bertetangga, kepedulian, kewajiban untuk saling melindungi, dan saling menghormati. Australia menghormati kuatnya keinginan masyarakat Tuvalu untuk selama mungkin tetap bermukim dengan aman dan bermartabat di tanah kelahirannya atas keterikatan mendalam masyarakat Tuvalu dengan tanah, laut, dan komunitasnya (Australia-Tuvalu *Falepili Union Treaty*, Article 2, 2023). Pernyataan tersebut mencerminkan prioritas penyelamatan daratan Tuvalu di atas opsi-opsi lainnya demi keberlanjutan masa depan kehidupan di permukaannya. Meski demikian, perjanjian ini tidak mengandung pernyataan mengenai tindak lanjut konkret berorientasi jangka panjang mengenai prioritas tersebut.

Bagi masyarakat Tuvalu, ancaman hilangnya tanah berarti ancaman terhadap eksistensi komunitas dan identitas karena keterikatan emosional mendalamnya dengan tanah leluhur. Konsep keterikatan spiritual tersebut disebut sebagai prinsip *fenua* dan *te sikulagi*, yang terkandung dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Tuvalu (International Court of Justice, 2024). Cara hidup (*way of life*) meliputi sistem religi dan kepercayaan, sistem bahasa, sistem ekonomi dan mata pencaharian, sistem pengetahuan, sistem teknologi, sistem kesenian, dan sistem sosial atau kelembagaan yang telah terinternalisasi antargenerasi dalam masyarakat Tuvalu menjadi taruhannya. Rasa bangga (*sense of pride*) terlahir apabila pelestarian terhadap eksistensi konstruksi dan kualitas

ekspresi hasil cipta, karya, dan karsa manusia baik berwujud material maupun non-material tersebut dapat terlindungi. Dalam kehidupan masyarakat adat (*indigenous people*) seperti masyarakat Tuvalu, keterikatan tersebut seringkali membuat masyarakat secara sadar memilih untuk bertahan di tanah airnya atau sering disebut fenomena imobilitas sukarela (*voluntary immobility*) (Barnett *et al.*, 2025; Nugraha, 2025).

Program migrasi iklim terencana ini memberikan hak spesial bagi masyarakat Tuvalu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat Australia. Pertemuan antara dua kebudayaan berbeda atau akulturasi tersebut harus melalui proses adaptasi yang berdampak dilematis bagi para migran. Dari sudut pandang positif, proses akulturasi yang intens dapat mendorong keaktifan masyarakat Tuvalu untuk menyesuaikan diri dan pada akhirnya mengadopsi sistem dan etos kehidupan masyarakat Australia. Hal tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas serta perluasan jejaring sosial diaspora Tuvalu di Australia. Identitas dan budaya Tuvalu dapat tetap terpreservasikan apabila jaringan diaspora tersebut mampu beradaptasi dengan baik serta mempertahankan solidaritas kesukumannya di negeri Australia. Kendati demikian, akulturasi juga dapat berujung pada asimilasi total yang meleburkan budaya asli bahkan menggantikannya dengan budaya baru.

Tanpa sosialisasi budaya yang kuat, generasi selanjutnya yang lahir dan lebih banyak berinteraksi sehari-hari dengan menggunakan cara hidup Australia rawan mengalami fenomena sosiologis *collective cultural amnesia*. Fenomena amnesia kolektif terkait akar sejarah dan budaya tersebut menyoroiti kesenjangan komunikasi antara generasi tua dan generasi muda ketika mereka berada dalam situasi tertekan untuk menyesuaikan diri dengan norma dan nilai standar budaya dominan di lingkungan baru (Adegunju, 2025). Para migran yang terbiasa dengan kehidupan komunal sederhana dituntut untuk masuk ke struktur metropolis masyarakat Barat yang individualis, serba monetisasi, dan transaksional. Secara gradual, identitas sosiokultural yang mereka bawa sebagai masyarakat Tuvalu asli terancam memudar. Terlebih lagi jika generasi selanjutnya merupakan hasil dari perkawinan antar ras (*interracial marriage*).

Masalah lainnya berkaitan dengan perbedaan budaya pendidikan. Skema migrasi ini memang memperluas aksesibilitas warga negara Tuvalu terhadap sistem pendidikan standar prima Australia yang mampu meningkatkan daya saing mereka di pasar tenaga kerja dan menunjang kesejahteraan. Meski demikian, masalah dapat muncul akibat perbedaan bahasa ajar dan substansi kurikulum. Bahasa Tuvalu dikhawatirkan perlahan tergeser oleh bahasa dominan yakni bahasa Inggris. Pada dasarnya, kurikulum pendidikan harus mengakomodasi aspek sosial dan budaya peserta didiknya. Absennya kedua aspek tersebut tentu berisiko menghambat proses sosialisasi budaya antargenerasi dalam masyarakat Tuvalu (Elina, 2025).

Fenomena erosi sosiokultural berdampak nyata bagi integritas kultural dan sistem kolektivisme komunal masyarakat Tuvalu. Dispersi geografis menyebabkan fragmentasi struktur komunitas yang mengancam kohesi sosial masyarakat meskipun perpindahan berlangsung secara berpola dan terencana. Pola mobilitas bertahap justru membawa ancaman lebih serius terhadap struktur sosiokultural karena berlangsung perlahan. Di tahun 2025, total populasi Tuvalu adalah 11,565 penduduk (Macrotrends, 2025). Perpindahan 280 orang per tahun di bawah skema ini ditambah jumlah emigran mandiri bukanlah fenomena yang kecil dan dapat berkembang menjadi gejala depopulasi (Farbotko, 2025).

Tingginya minat penduduk Tuvalu untuk bermigrasi dipengaruhi oleh *ecological grief* akibat parahnya dampak krisis iklim di tempat tinggal mereka (Gibson *et al.*, 2020). Sedikitnya 82% dari total populasi Tuvalu mengajukan diri dalam rekrutmen pertama skema migrasi iklim terencana Perjanjian *Falepili Union* (Aulia, 2025). Ancaman depopulasi menjadi semakin nyata akibat keengganan generasi muda Tuvalu untuk memulai keluarga di tengah kondisi ketidakpastian (Needham, 2020). Meski demikian, dalam konteks tertentu, migrasi tidak selalu mengindikasikan kehancuran komunitas tetapi justru menjadi strategi keberlanjutan apabila diiringi dengan jaringan dukungan yang sensitif budaya (Nugraha, 2025).

Kesejahteraan jiwa dan penghormatan atas martabat masyarakat merupakan determinan penting dalam mengamati keamanan sosiokultural komunitas di tengah fenomena migrasi. Perbedaan ras, hambatan bahasa, keterampilan dan tingkat pendidikan yang relatif terbatas, serta kerentanan terhadap kegegaran budaya (*culture shock*) membuat para migran dari Tuvalu rawan akan marginalisasi dan diskriminasi terselubung di tempat kerja, unit pendidikan, fasilitas kesehatan, dan kehidupan bermasyarakat secara umum. Meskipun hak-hak mereka dilindungi secara formal oleh Pemerintah Australia, kelompok migran sulit terlepas dari stereotip negatif warga asli. Selama ini, Australia telah mengandalkan migran untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor industri kunci seperti keperawatan dan konstruksi. Namun beberapa tahun belakangan, populisme dan sentimen anti-migran di Australia menunjukkan peningkatan.

Berdasarkan hasil survei Lowy Institute (2025), 53% responden warga asli Australia setuju bahwa jumlah migran yang didatangkan oleh Pemerintah Australia setiap tahunnya “terlalu tinggi”. Partai One Nation dan gerakan March for Australia konsisten menyuarakan protes terhadap kebijakan migrasi massal pemerintah yang dituduh bertentangan dengan kepentingan nasional dan telah menyebabkan krisis perumahan, pengangguran kaum muda, kriminalitas, hingga kebangkitan anti-semitisme. Fenomena tersebut mencerminkan kepanikan moral yang dirasakan oleh warga asli akibat kehadiran kaum migran yang dianggap telah merebut porsi hak mereka sebagai warga negara asli (Mayer & Khorana, 2025). Menurunnya penerimaan oleh kalangan warga asli meningkatkan kerentanan kaum migran terhadap perlakuan tidak adil dan diskriminasi rasial.

Sebagai persiapan menghadapi potensi kehilangan wilayah teritorial dan ancaman erosi sosiokultural, Pemerintah Tuvalu mulai melakukan digitalisasi sistem pemerintahan serta pengarsipan sejarah dan budaya melalui proyek Future Now. Terobosan ini disertai dengan redefinisi kedaulatan negara dalam konstitusi Tuvalu yang menegaskan bahwa legitimasi status kenegaraan Tuvalu tidak akan terpengaruhi oleh deteritorialisasi (Kofe, 2023). Saluran ini mengatur segala urusan pemerintahan, mulai dari akses terhadap layanan administratif pemerintah hingga pemungutan suara secara virtual. Inisiatif ini berperan sebagai penghubung antara generasi kini dan generasi masa depan Tuvalu, juga antara warga negara yang tetap tinggal di Tuvalu dan warga negara yang telah bermigrasi ke luar negeri. Meski demikian, digitalisasi tidak menjamin keberlanjutan praktik dan tradisi budaya masyarakat Tuvalu yang banyak didasarkan pada kehidupan kepulauan (Elina, 2025). Digitalisasi juga tidak mencegah komunitas masyarakat Tuvalu di Australia dari asimilasi budaya total.

KESIMPULAN

Dalam pendekatan kritis keamanan manusia, keselamatan fisik dan bertahan hidup tidak serta-merta ekuivalen dengan kesejahteraan. Kondisi aman dan tidak aman ditentukan oleh kualitas dari nilai kehidupan manusia yang dilindungi, yakni ketika mereka memiliki kebebasan dan kapasitas untuk hidup secara bermartabat. Pendekatan ini juga menegaskan bahwa martabat dan hak asasi manusia tidak mengenal batas yurisdiksi.

Kerentanan yang tengah dihadapi Tuvalu sebagai episenter dampak nyata kedaruratan iklim tak hanya pada dimensi lingkungan, tetapi berinterkoneksi dengan dimensi ekonomi, sosiokultural, bahkan politik. Disfungsi tersebut menciptakan situasi dilematis antara mengamankan keberlangsungan material kehidupan dan konsekuensi pengabaian ruang hidup asli, serta erosi komunitas. Fragilitas Tuvalu telah berada pada tahapan di mana pengetahuan tradisional, aksi kolektif komunitas dan pemerintah lokal tidak lagi cukup menekan laju kerusakan. Tuvalu seakan telah bersiap menghadapi skenario terburuk selagi berusaha mengulur waktu. Demi mengamankan keberlanjutan masa depan rakyat dan negaranya di tengah ancaman hilangnya integritas teritorial, Tuvalu mendefinisikan ulang kedaulatan dan mempererat jaringan pengamannya (*safety net*).

Migrasi tidak secara inheren “positif” maupun “negatif”. Migrasi dapat menjadi barometer untuk mengukur resiliensi sekaligus kerentanan. Skema migrasi iklim terencana dalam Perjanjian *Falepili Union* antara Pemerintah Australia dan Tuvalu telah menyentuh logika keamanan manusia, tetapi secara simultan juga memperdalam ketergantungan dan berisiko menghadirkan kerentanan baru. Ketidakamanan tersebut terdistribusikan kepada mereka yang bertahan di Tuvalu dan bermigrasi ke Australia. Efektivitas dari skema migrasi ini bergantung pada bagaimana siklus kontribusi timbal balik antarkeduanya dapat menyediakan kebermanfaatannya jangka panjang yang setara bagi keduanya. Penguatan resiliensi dan kelayakan huni di Tuvalu sepatutnya menjadi prioritas utama agar masyarakat Tuvalu dapat melanjutkan kehidupan *in situ* di tanah airnya sendiri, kecuali sebagai upaya terakhir. Pertimbangan tersebut ditujukan untuk mencegah strategi pragmatis yang justru berisiko kontraproduktif.

Sebagai rekomendasi, diperlukan pemantauan dan penyempurnaan tata kelola keberlanjutan skema migrasi ini. Tuvalu perlu mempertegas pelaksanaan hak non-derogatif bangsa dan negaranya untuk tetap subsisten serta menjadi penentu atas nasibnya sendiri (*self-determination*). Terakhir, model adaptasi iklim Tuvalu dapat menjadi model percontohan bagi sesama negara-negara Small Island Developing States (SIDS) yang mengalami tekanan kerentanan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adegunju, A. (2025). Cultural Amnesia: The Curriculum of Repression and Assimilation. *Currere Exchange Journal*, 9(1).
- Akel, R. (2024). *Keeping the Refugee Convention Relevant: Expanding Protection for Environmentally Displaced Populations*. Rice University's for Public Policy Baker Institute.
- Amelia, S. V. (2025). *Analysis of Australia's Strategic Interest against China from the Falepili Agreement in 2023 with Tuvalu: Perspective Of Walt's Balance Of Threats (Thesis)*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. <http://repository.upnvj.ac.id/39192/>
- Asian Development Bank. (2026). *Basic Statistics, Asia and the Pacific 2026*. <https://data.adb.org/dataset/basic-statistics-asia-and-pacific>

- Aulia, L. (2025, July 23). "Migrasi Iklim" di Depan Mata, 80 Persen Warga Tuvalu Cari Visa Iklim di Australia. Kompas. <https://www.kompas.id/artikel/migrasi-iklim-di-depan-mata-80-persen-warga-tuvalu-cari-visa-iklim-ke-australia>
- Australia-Tuvalu *Falepili Union Treaty*, November 9, 2023, <https://www.dfat.gov.au/geo/tuvalu/australia-tuvalu-falepili-union-treaty>
- Barnett, J., Farbotko, C., Kitara, T., and Aselu, B. (2025). Migration as Adaptation? The *Falepili Union* Between Australia and Tuvalu. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 16 (1). <https://doi.org/10.1002/wcc.924>
- Bazela, M. & Robinson, J. C. (2025). The Risk of Climate-Induced Migration in Tuvalu: Lessons and Way Forward. *The International Journal of Interdisciplinary Civic and Political Studies*, 20(1), 125-141. <https://doi.org/10.18848/2327-0071/CGP/v20i01/125-141>
- Boas, I. (2015). *Climate Migration and Security: Securitisation as a Strategy in Climate Change Politics*. Routledge.
- Buzan, B. (1983). *People, states and fear: an agenda for international security studies in the post-Cold War era*. Pearson Education.
- Buzan, B. (1991). New Patterns of Global Security in the Twenty-first Century. *International Affairs*, 67(3), 431-451. <https://doi.org/10.2307/2621945>
- Elina, A. N. (2025). Kebijakan Luar Negeri Australia dalam Mempertahankan Posisinya di Pasifik Selatan melalui Perjanjian Falepili dengan Tuvalu Tahun 2023-2024. *Global Insights Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.36859/gij.v2i1.4250>
- Explanatory Memorandum - *Falepili Union* Between Tuvalu and Australia, May 8, 2024. <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/explanatory-memorandum-falepili-union-between-tuvalu-australia.pdf>
- Farbotko, C. (2025, January 24). *Climate Change, International Migration and Self Determination: Lessons from Tuvalu (Issue Brief No. 208)*. Toda Peace Institute. <https://toda.org/publications/policy-briefs-and-reports/report-208-full-text/>
- Farbotko, C., Kitara, T., Dun, O., & Evans, C. (2022). A climate justice perspective on international labour migration and climate change adaptation among Tuvaluan workers. *Oxford Open Climate Change*, 2(1). <https://doi.org/10.1093/oxfclm/kgac002>
- Farbotko, C. & Kitara, T. (2023, November 24). *Tuvalu, Australia, and the Falepili Union*. Australian Institute of International Affairs. <https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/tuvalu-australia-and-the-falepili-union/>
- Frölicher, T. L., Fischer, E. M., & Gruber, N. (2018). Marine heatwaves under global warming. *Nature*, 560(7718), 360–364.
- Gamboa, L. & Goh, D. (2025). Australia-Tuvalu *Falepili Union*: The First Bilateral Climate Mobility Treaty. *Carnegie Endowment for International Peace Article [Online]*. <https://carnegieendowment.org/research/2025/09/australia-tuvalu-falepili-union-the-first-bilateral-climate-mobility-treaty>
- Gibson, K. E., Barnett, J., Haslam, N., & Kaplan, I. (2020). The mental health impacts of climate change: Findings from a Pacific Island atoll nation. *Journal of Anxiety Disorders*, 73. <https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2020.102237>
- Green, A. & Guilfoyle, D. (2024). The Australia-Tuvalu *Falepili Union Treaty*: Statehood and Security in the Face of Anthropogenic Climate Change. *American Journal of International Law*, 118(4), 684-703. <https://doi.org/10.1017/ajil.2024.54>

- Hampson, F. O. (2008). Human Security. In P. D. Williams (Ed.), *Security Studies: An Introduction* (pp. 229-243). Routledge.
- International Court of Justice (ICJ). (2024). *Obligations of States in Respect of Climate Change (Request for Advisory Opinion) - Written Statement of Tuvalu*. <https://icj-cij.org/sites/default/files/case-related/187/187-20240322-wri-05-00-en.pdf>
- Jiang, X., Huang, Z., & Zhao, X. (2025). Climate-related migration practices from the Cancun Adaptation Framework to the Australia-Tuvalu *Falepili Union* treaty: Implications for the international legal regime. *Review of European, Comparative & International Environmental Law*, 34(1), 210-227. <https://doi.org/10.1111/reel.12611>
- Kinsella, L. (2026, April 18). *The truth about Australia's immigration debate in six charts*. Australian Financial Review. <https://www.afr.com/policy/economy/the-truth-about-australia-s-immigration-debate-in-six-charts-20260202-p5nysj>
- Kitara, T. & Farbotko, C. (2023). *This is not Climate Justice: The Australia-Tuvalu Falepili Union*. Toda Peace Institute Global Outlook.
- Lamont, C. (2015). *Research Method in International Relations*. SAGE Publications.
- Lowy Institute. (n.d.) *Pacific Aid Map [Tuvalu]*. <https://pacificaidmap.lowyinstitute.org/country/tuvalu/#6.197/178.571/-7.741>
- Luahambowo, K. S. O., Sugiharto, S., Putra, M., Sembiring, S., & Marpaung, V. (2025). Analisis Geopolitik Dampak Perubahan Iklim terhadap Ketahanan Negara-Negara Kepulauan di Pasifik. *Cendekia: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 1-4.
- Macrotrends. (2025). *Tuvalu Population (1990-2025)*. <https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/tuv/tuvalu/population#>
- Mayer, P. & Khorana, S. (2025, December 2). *Immigration panic comes in waves. Data shows who worries most, and when*. The Conversation. <https://theconversation.com/immigration-panic-comes-in-waves-data-shows-who-worries-most-and-when-270565>
- McAdamm, J. (2025, June 27). *1 in 3 Tuvaluans is bidding for a new 'climate visa' to Australia – here's why everyone may ultimately end up applying*. TheConversation. <https://theconversation.com/1-in-3-tuvaluans-is-bidding-for-a-new-climate-visa-to-australia-heres-why-everyone-may-ultimately-end-up-applying-259990>
- McClain, S. N. & Bruch, C. (2021). Migration with Dignity: A Framework to Manage Climate Change and Prevent Conflict. *Peace & Justice Studies Association, Climate* (Spring 2021).
- NASA Sea Level Change Team. (August 30, 2024). *Sea Level Summary for Funafuti, Tuvalu*. https://sealevel.nasa.gov/internal_resources/519/Funafuti_Tuvalu_combined.pdf
- Needham, K. (2024). *Sinking Tuvalu fights to keep maritime boundaries as sea levels rise*. Reuters. <https://www.reuters.com/investigations/sinking-tuvalu-fights-keep-maritime-boundaries-sea-levels-rise-2024-09-24/>
- Nef, J. (1995). *Human Security and Mutual Vulnerability: An Exploration into the Global Political Economy of Development and Underdevelopment*. International Development Research Centre.
- Nugraha, M. E. (2025). Sea Level Rise and Mass Displacement: An Existential Threat to Pacific Island States. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 9(9).
- Office of the Prime Minister of Australia: The Hon Anthony Albanese MP. (2023, November 10). *Press conference - Rarotonga, Cook Islands* [Press release]. <https://www.pm.gov.au/media/press-conference-rarotonga-cook-islands>

- Pacific Islands Forum - Pacific Regional Framework on Climate Mobility, November 10, 2023, <https://forumsec.org/publications/pacific-regional-framework-climate-mobility>
- Sedra, M. (2022). *Contributing Paper-A People-Centered Approach to Security: seeking conceptual clarity to guide UN policy development*. United Nation Development Programme, Folke Bernadotte Academy. <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-06/The%20People-Centered%20Approach%20to%20Security.pdf>
- Tuvalu Central Statistic Divisions. (2025). *Hardships in Tuvalu 2022-23 Report*. Tuvalu. <https://stats.gov.tv/news/hardship-in-tuvalu-2022-23/>
- United Nations Development Programme (UNDP). (1994). *Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security*. New York. <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-1994>
- Wæver, O., Buzan, B., Kelstrup, M., Lemaitre, P. (1993). *Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe*. Pinter Publishers.
- World Bank Group. (2021). *Climate Risk Country Profile: Tuvalu*. Washington, DC. https://climateknowledgeportal.worldbank.org/sites/default/files/country-profiles/15824-WB_Tuvalu%20Country%20Profile-WEB.pdf
- Zheng, H., Cheng, L., Dangendorf, S., Meyssignac, B., Barnoud, A., Trenberth, K. E., Fasullo, J. T., & Abraham, J. (2026). Improved closure of the global mean sea level budget from observational advances since 1960. *Science Advances*, 12 (21). <https://doi.org/10.1126/sciadv.aea0652>